

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran Program Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat salah satu program unggulan daerah melaksanakan wajib belajar 16 (enam belas) tahun, serta dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Malinau.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau bersama-sama dengan para pejabat struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau; yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan di bidang pendidikan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Malinau.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Rancangan awal Renstra sebagai penjabaran dari Tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pendidikan daerah yang disesuaikan dengan RPJMD.

2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Renstra.

Musrenbang Renstra diselenggarakan oleh Sekretariat Dinas pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang diikuti oleh semua bidang teknis, sekretariat dan UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, dengan materi rancangan awal Renstra.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

Berdasarkan hasil Musrenbang Renstra, Bidang Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Pendidikan, Kabupaten Malinau menyusun Rancangan Akhir Renstra.

Hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1. Hubungan Renstra dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Malinau

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif.

2. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Renja-PD sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra.

3. Hubungan Renstra dengan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah dokumen operasional SKPD pada tingkat kabupaten untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai rencana kerja operasional Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten dengan mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Tahun 2016-2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

- Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13)
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
 13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah :

1. Maksud

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam lima tahun mendatang. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

1. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab. VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

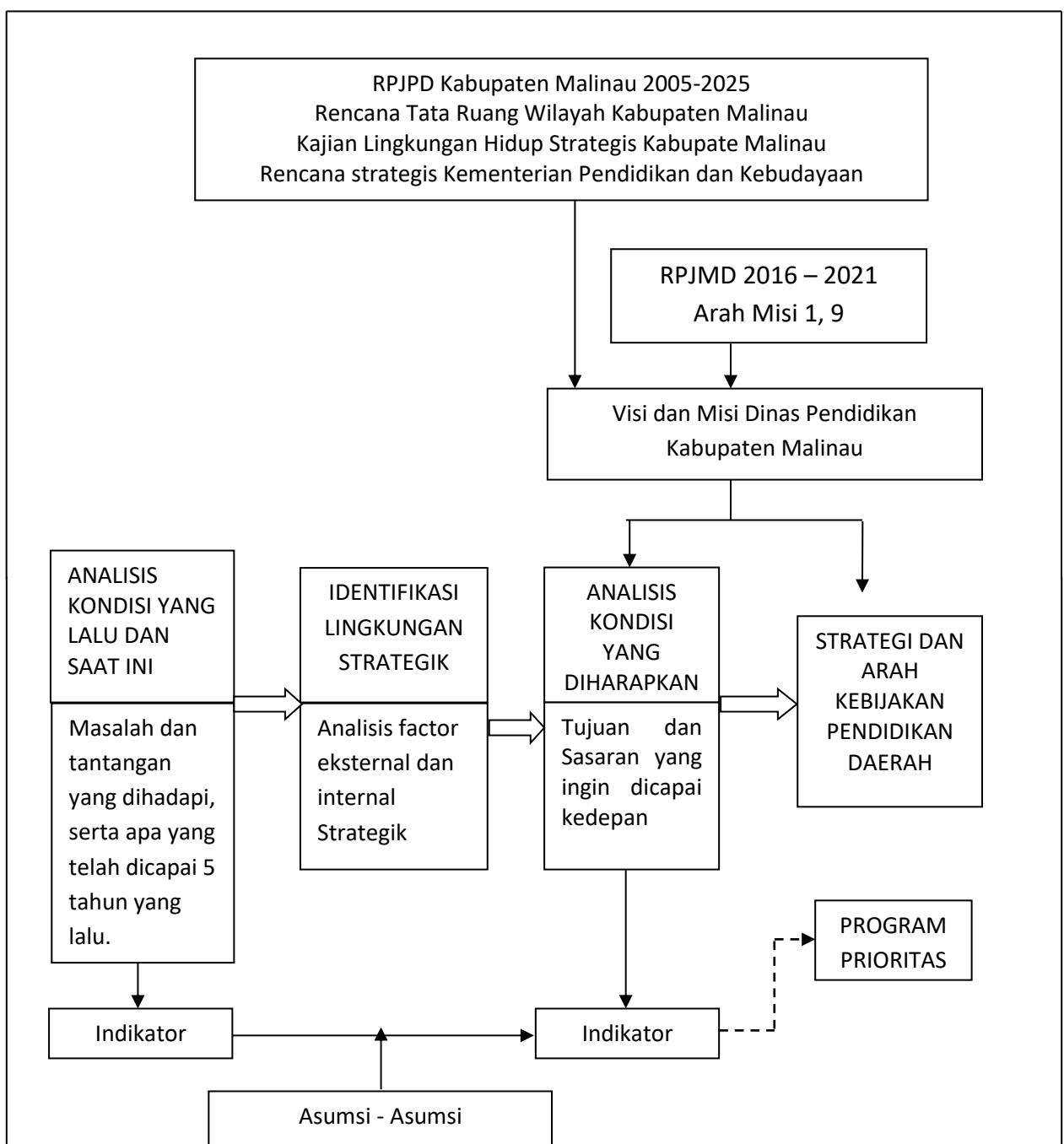
Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

2. Kerangka Pikir

Penyusunan Renstra diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pendidikan daerah serta program-program pendidikan, dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam RPJMD, dengan berdasarkan RPJPD Kabupaten Malinau, RTRW Kabupaten Malinau, Renstra K/L dan Renstra Propinsi Kalimantan Utara.

Gambar 1
Kerangka Pikir Renstra Dinas Pendidikan Kab. Malinau



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagai tindak lanjut atas peraturan hukum tersebut diatas, dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau selanjutnya dirubah sesuai Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dimana dilaksanakan perubahan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.

Peraturan perangkat daerah didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa dinas, badan, sekretariat serta kecamatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :

- Kepala Dinas
- Sekretariat
 - o Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
 - o Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

- Seksi PAUD
- Seksi Pendidikan Non Formal
- Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan
- Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - Seksi Kurikulum
 - Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
 - Seksi Sarana dan Prasarana
- Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 - Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - Seksi PTK Sekolah Dasar
 - Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau memiliki 6 (enam) UPTD yaitu (1) UPTD wilayah Mentarang, Mentarang Hulu dan Perwakilan Sungai Tubu berkedudukan di Pulau Sapi; (2) UPTD wilayah Malinau Selatan berkedudukan di Long Loreh; (3) UPTD wilayah Kayan Hulu, Kayan Selatan dan Kayan Hilir berkedudukan di Long Nawang; (4) UPTD wilayah Pujungan dan Bahau Hulu berkedudukan di Long Pujungan; (5) UPTD wilayah Sungai Boh dan Perwakilan Long Sule berkedudukan di Mahak Baru; (6) UPTD wilayah Malinau Kota, Malinau Utara dan Malinau Barat berkedudukan di Malinau Kota.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Guna melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi serta mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program perencanaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, yang memiliki tugas pokok melakukan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.

3. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, keuangan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkordinasian penyusunan program kerja, pengelelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelelolaan keuangan Dinas.

II. BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;

- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- f. Penyiapan pelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dibidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PAUD.

3. Seksi Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan non formal.

4. Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan

Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tugas perbantuan bidang pendidikan.

III. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembinaan pendidikan dasar di bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pendidikan dasar bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan pembinaan pendidikan dasar bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pembinaan pendidikan dasar bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;

- e. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- f. Penyiapan pelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dibidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kurikulum

Seksi Kurikulum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum.

3. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung kepada kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan peserta didik.

4. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung kepada kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tugas perbantuan bidang sarana dan prasarana.

IV. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) mempunyai melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal, PTK Sekolah Dasar dan PTK Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- f. Penyiapan pelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dibidang bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal.

3. Seksi PTK Sekolah Dasar

Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PTK Sekolah Dasar.

4. Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PTK Sekolah Menengah Pertama.

V. UNIT PELAKSA TEKNIS DINAS (UPTD)

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;

- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis dari sebagian tugas pokok Dinas Pendidikan;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah serta ditetapkan dengan keputusan Bupati Malinau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VI. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahliannya;
- Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

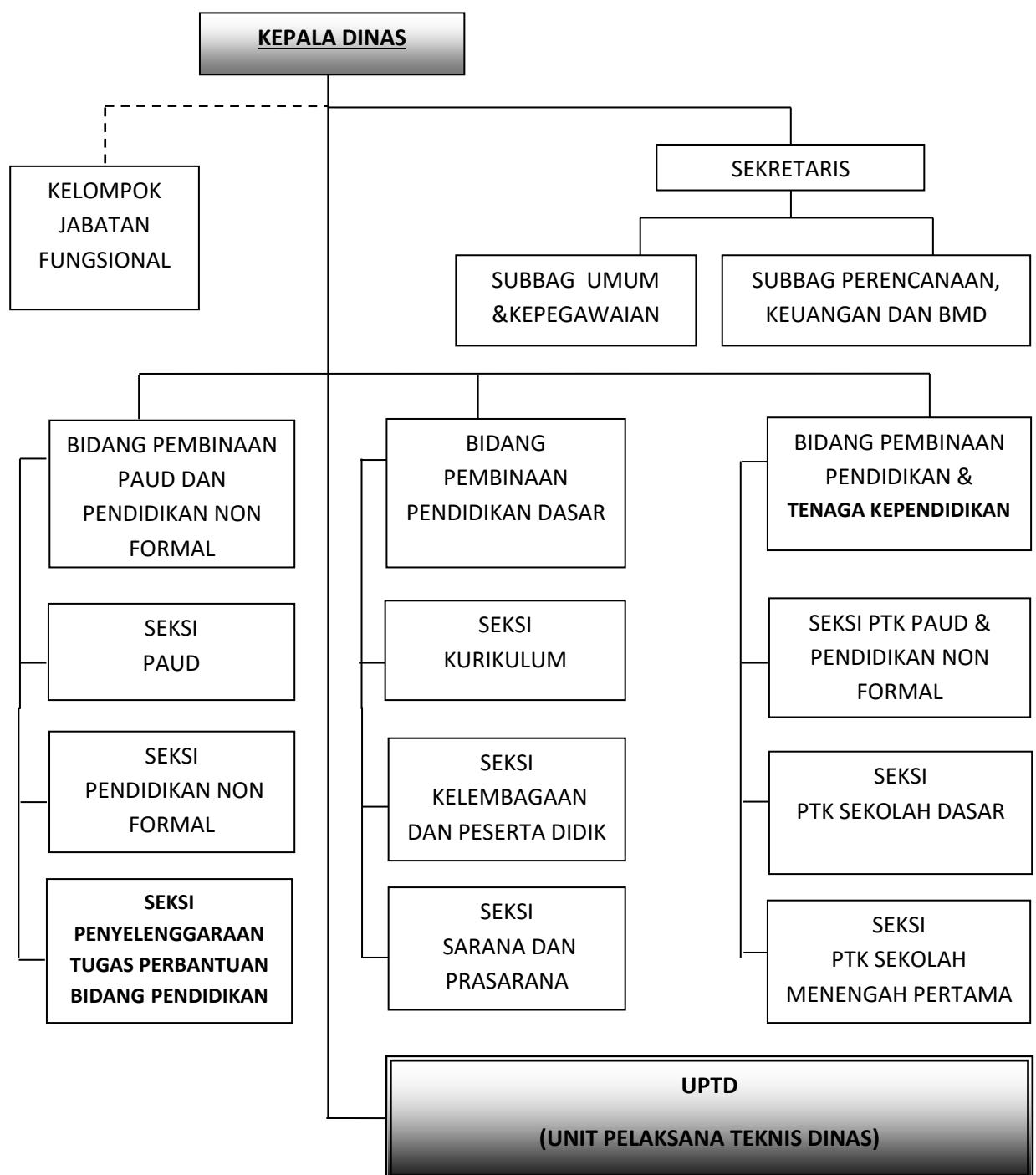
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

Dalam rangka melaksanakan tugas layanan pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
- III. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 1. Seksi PAUD
 2. Seksi Pendidikan Non Formal
 3. Seksi Penyelenggaraan Tugas Pertambuan Bidang Pendidikan
- IV. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 1. Seksi Kurikulum
 2. Kelembagaan dan Peserta Didik
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- V. Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal

2. Seksi Sekolah Dasar
 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama
- VI. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- VII. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU



2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan

Berdasarkan kebutuhan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut:

- Semua Kepala Bidang dan Kepala Seksi seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan paling tidak memiliki pendidikan Strata I dalam bidang pendidikan, hukum, manajemen dan/atau teknik sipil.
- Setiap Kepala Sub.Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi strata I dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan, komunikasi dan administrasi/manajemen.
- Staf di seksi teknis seharusnya 70% memiliki kualifikasi Strata I, 20% sertifikat diploma/sertifikasi training yang relevan dengan isu pendidikan. Sedangkan 10% cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
- Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau 90% minimal berkualifikasi Strata I dan 10% cukup Diploma yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Sosok Aparatur Dinas Pendidikan hendaknya memiliki pengetahuan dan berbagai permasalahan pendidikan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang kependidikan, memahami dan berpengalaman dalam proses-proses keorganisasian. Kemampuan dalam melakukan pembinaan dan kepemimpinan. Selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, UPTD dan Pengawas Sekolah
Kabupaten Malinau Tahun 2017

| No. | Bagian/Bidang | Jumlah |
|---------------|--|---------------|
| 1. | Kepala | 1 |
| 2. | Sekretariat | 25 |
| 3. | Bidang Pembinaan PAUD & Pend. Non Formal | 9 |
| 4. | Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar | 13 |
| 5. | Bidang Pembinaan PTK | 9 |
| 6. | UPTD | 15 |
| 7. | Pengawas Sekolah (Jabatan Fungsional) | 18 |
| Jumlah | | 80 |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

| No. | Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 1. | Pasca Sarjana (S2) | 2 | |
| 2. | Sarjana (S1) | 24 | |
| 3. | Diploma III (D-III) | 3 | |
| 4. | Diploma II (D-II) | - | |
| 5. | Diploma I (D-I) | - | |
| 6. | SMA | 28 | |
| 7. | SMP | - | |
| 8. | SD | - | |
| Jumlah | | 57 | |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang
Tahun 2017

| No. | Pangkat / Golongan Ruang | Jumlah | Keterangan |
|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| 1. | Pembina TK. I | IV/b | 2 |
| 2. | Pembina | IV/a | 5 |
| 3. | Penata TK. I | III/d | 5 |
| 4. | Penata | III/c | 3 |
| 5. | Penata Muda TK. | III/b | 6 |
| 6. | Penata Muda | III/a | 4 |
| 7. | Pengatur TK. I | II/d | 4 |
| 8. | Pengatur | II/c | 18 |
| 9. | Pengatur Muda TK. I | II/b | 6 |
| 10. | Pengatur Muda | II/a | 3 |
| 11. | Juru TK. I | I/d | - |
| 12. | Juru | I/c | - |
| 13. | Juru Muda TK. I | I/b | - |
| 14. | Juru Muda | I/a | - |
| Jumlah | | 57 | |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau Berdasarkan Eselon
Tahun 2017

| No. | Bagian/Bidang | Jumlah | Keterangan | |
|---------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | | Definitif | Ttd.Definitif |
| 1. | Eselon II/a | 1 | 1 | - |
| 2. | Eselon III/a | 1 | 1 | - |
| 3. | Eselon III/b | 3 | 3 | - |
| 4. | Eselon IV/a | 16 | 16 | - |
| 5. | Eselon IV/b | 5 | 5 | - |
| Jumlah | | 26 | 26 | - |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

4. Sarana Prasarana Dinas Pendidikan

Tabel 2.5
Sarana Prasarana Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau Tahun 2017

| No | Nama Bidang Barang | Jumlah Barang | Keterangan |
|-----------|---|-----------------------------|---|
| 1. | Tanah | 2 Bidang | |
| 2. | Alat-alat angkut: • Mobil (roda empat) • Bus • Sepeda motor (roda dua) | 2 unit 1 unit 13 unit | Kepala Dinas dan sekretaris Jemputan Sekolah Operasional |
| 3. | Alat-alat kantor dan rumah tangga | 270 unit | |
| 4. | Bangunan gedung | 2 gedung | |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

5. Anggaran

Anggaran Dinas Pendidik Kabupaten Malinau, yang masih merupakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau Tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau
Tahun 2013- 2016

| No | Tahun | Belanja Tidak Langsung | Belanja Langsung | Jumlah |
|-----------|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | 2011 | 109.093.487.910 | 138.291.560.896 | 247.385.048.806 |
| 2. | 2012 | 105.760.691.471 | 163.628.297.350 | 269.388.988.821 |
| 3. | 2013 | 124.727.738.989 | 180.216.819.850 | 304.944.558.839 |
| 4. | 2014 | 135.462.778.537 | 156.536.465.250 | 291.999.243.787 |
| 5. | 2015 | 160.332.651.768 | 104.193.639.985 | 264.526.441.753 |
| 6 | 2016 | 154.424.000.373 | 75.358.644.220 | 229.782.644.593 |

Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD (2017)

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU

| No | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI | TARGET NSPK | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR | TARGET RENSTRA TAHUN | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN | | | | | RASIO CAPAIAN TAHUN KE | | | | |
|-----|--|-------------|------------|------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 | SD/MI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | % Jarak Mak 3km untuk SD 3 km daerah terpencil | | | | 82.41 | 84.26 | 87.04 | 90.74 | 93.52 | 82.41 | 84.26 | 87.04 | 90.74 | 93.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | % Jarak Mak 3km untuk MI 3 km daerah terpencil | | | | | 50.00 | 66.67 | 100 | | | 50.00 | 66.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | % yang mengajar 1 guru dengan 32 siswa | | | | 97.70 | 98.91 | 94.12 | 97.70 | 98.91 | 97.70 | 98.91 | 94.12 | 97.70 | 98.91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | % SD yang memiliki 6 guru | | | | 93.10 | 94.57 | 92.94 | 93.10 | 94.57 | 93.10 | 94.57 | 92.94 | 93.10 | 94.57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | % MI yang memiliki 6 guru | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | % setiap rombel yang cukup meja dan kursi | | | | 91.95 | 94.57 | 88.24 | 91.95 | 94.57 | 91.95 | 94.57 | 88.24 | 91.95 | 94.57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | % SD yang tersedia ruang guru yang lengkap meja kursi | | | | 98.85 | 100 | 97.65 | 98.85 | 100 | 98.85 | 100 | 97.65 | 98.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | % Kepala sekolah kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat Pendidik | | | | 90.80 | 94.57 | 89.41 | 90.80 | 94.57 | 90.80 | 94.57 | 89.41 | 90.80 | 94.57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | % SD yang memiliki 2 guru yang bersertifikat Pendidik | | | | 66.67 | 68.48 | 65.88 | 66.67 | 68.48 | 66.67 | 68.48 | 65.88 | 66.67 | 68.48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | SMP/MTs | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | % Jarak Mak 3km untuk SMP 6 km daerah terpencil | | | | 78.70 | 87.04 | 74.07 | 78.70 | 87.04 | 78.70 | 87.04 | 74.07 | 78.70 | 87.04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | % SMP yang mengajar 1 | | | | 92.31 | 96.30 | 91.67 | 92.31 | 96.30 | 92.31 | 96.30 | 91.67 | 92.31 | 96.30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | guru dengan 36 siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | % MTs yang mengajar 1 guru dengan 36 siswa | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | % SD yang tersedia ruang guru yang lengakap meja kursi | | | 96.15 | 100 | 95.83 | 96.15 | 100 | 96.15 | 100 | 95.83 | 96.15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran | | | 84.62 | 92.59 | 75.00 | 84.62 | 92.59 | 84.62 | 92.59 | 75.00 | 84.62 | 92.59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | % SMP yang memiliki 1 orang guru kualifikasi S1/DIV sesuai mata pelajaran | | | | | 83.33 | 84.62 | 85.19 | | | 83.33 | 84.62 | 85.19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | % Kepala SMP kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat Pendidik | | | 96.15 | 96.30 | 95.65 | 96.15 | 96.30 | 96.15 | 96.30 | 95.65 | 96.15 | 96.30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | % guru SMP yang kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat Pendidik diatas ≥ 35% | | | 92.31 | 96.30 | 91.67 | 92.31 | 96.30 | 92.31 | 96.30 | 91.67 | 92.31 | 96.30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | TARGET IKK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1 | Focus Keseharian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Melek Huruf (AMH) | | % | 98.65 | 98.86 | 98.92 | 98.98 | 99.00 | 69.00 | 69.02 | 69.02 | 69.03 | 69.05 | 69.94 | 69.81 | 69.77 | 69.74 | 69.74 |
| 2 | Rata-rata lama sekolah | | Tahun | 7.75 | 7.79 | 7.83 | 7.87 | 7.91 | 7.95 | 8.00 | 8.16 | 8.20 | 8.30 | 102.58 | 102.69 | 104.21 | 104.19 | 104.93 |
| 3 | APK SD/MI | | % | 98.87 | 98.93 | 98.99 | 99.05 | 99.11 | 87.00 | 89.00 | 91.15 | 94.15 | 97.25 | 87.99 | 89.96 | 92.08 | 95.05 | 98.12 |
| 4 | APK SMP/MTs | | % | 90.36 | 90.97 | 91.58 | 92.19 | 92.80 | 87.00 | 90.00 | 93.00 | 95.10 | 97.25 | 96.28 | 98.93 | 101.55 | 103.15 | 104.79 |
| 7 | APM SD/MI | | % | 86.94 | 86.96 | 86.98 | 87.00 | 87.03 | 70.00 | 72.00 | 73.84 | 75.00 | 77.66 | 80.51 | 82.79 | 84.89 | 86.20 | 89.23 |
| 8 | APM SMP/MTs | | % | 86.53 | 86.55 | 86.66 | 87.00 | 87.20 | 70.15 | 73.00 | 76.00 | 79.00 | 81.77 | 81.07 | 84.34 | 87.69 | 90.80 | 93.77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | Aspek Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | APS 7-12 Tahun | | % | 97.04 | 97.19 | 97.34 | 97.49 | 97.64 | 87.15 | 90.00 | 93.00 | 95.00 | 97.25 | 89.80 | 92.60 | 95.54 | 97.44 | 99.60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 | Rasio Guru/Murid SD/MI | | | Rasio | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 3 | APS 13-15 Tahun | | | % | 88.01 | 88.12 | 88.14 | 88.15 | 88.17 | 85.20 | 89.15 | 90.15 | 92.15 | 94.84 | 96.80 | 101.16 | 102.28 | 104.53 | 107.56 |
| 4 | Rasio Guru/Murid SMP/MTs | | | Rasio | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 5 | Angka Putus Sekolah SD/MI | | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | | | % | 3.01 | 3.00 | 2.98 | 2.97 | 2.96 | 2.96 | 2.95 | 2.93 | 2.91 | 2.90 | 98.33 | 98.33 | 98.32 | 97.97 | 97.97 |
| 7 | Angka Kelulusan SD/MI | | | % | 89.00 | 89.80 | 90.60 | 91.40 | 92.20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 112.35 | 111.35 | 110.37 | 109.40 | 108.45 |
| 8 | Angka Kelulusan SMP/MTs | | | % | 67.90 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 73.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 147.27 | 147.05 | 142.85 | 138.88 | 136.98 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.2 | PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | APK PAUD | | | | 98.87 | 98.93 | 98.99 | 99.05 | 99.11 | 98.87 | 98.93 | 98.99 | 99.05 | 99.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TABEL 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU

| Uraian | Anggaran pada Tahun (Juta) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun(Juta) | | | | | Ratio Antara Realisasi dan Anggaran | | | | | Rata-rata pertumbuhan | | |
|----------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|------|----------|
| | Ke - | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ke - | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran |
| Anggaran | 269.389 | 304.955 | 391.999 | 264.526 | 229.782 | 235.834 | 273.864 | 269.583 | 256.548 | 219.801 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.97 | 0.87 | 0.98 | 0.99 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Perencanaan dan perancangan pendidikan pada hakekatnya merupakan pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan yang terpadu. Eksplorasi sumber daya manusia yang tidak memperhatikan kearifan lokal diduga akan menyebabkan krisis identitas. Pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan melalui proses perencanaan dan perancangan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Penerapan kearifan lokal (local wisdom) merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan binaan yang harmoni dan sustainable melalui pemanfaatan pengetahuan lokal (indigenous knowledge), pendekatan konstekstual serta pendekatan partisipatif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau berusaha untuk mewujudkan masyarakat Daerah Kabupaten Malinau yang berpendidikan dan berkarakter sebagai konsekwensi dari perkembangan dewasa ini yang menuntut adanya SDM yang berkualitas agar mampu berinteraksi dan bersaing secara mantap dalam percaturan kehidupan global yang tiada lagi batas-batas dinding kewilayahannya. Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang berkualitas sehingga dapat menjadi subjek pembangunan yang handal demi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Sejalan dengan itu adalah peran dan fungsi utama pemerintahlah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasinya sehingga semua potensi yang dimiliki masyarakat dapat didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Di dalam upaya mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor untuk merumuskan strategi kebijakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau,

yaitu dengan menggunakan model analisis situasi SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat).

1. Analisis Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

1. Regulasi, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kependidikan;
2. Tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pendidikan yang jelas, tegas dan pasti dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas maupun pekerjaan.
3. SDM Dinas Pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan yang mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Malinau.
5. Terbentuknya lembaga pendukung pendidikan yaitu Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
6. Kebudayaan lokal yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat Malinau sebagai wujud kearifan dan keunggulan lokal.
7. Sistem Teknologi Informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan zaman (*up to date*) dan teknologi. Koordinasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan wewenang dan urusan masing-masing antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2.9
Identifikasi dan Analisis Kekuatan (*Strengths*)
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

| No. | Indikator | Potensi | Skor | Skor Tertimbang |
|-----|--|---------|------|-----------------|
| 1. | Regulasi, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kependidikan, | 0,15 | 4 | 0,225 |
| 2. | Tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pendidikan yang jelas, tegas dan pasti dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas maupun pekerjaan. | 0,15 | 4 | 0,225 |

| | | | | |
|----|---|------|---|-------|
| 3. | SDM Dinas Pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan yang mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan. | 0,15 | 4 | 0,175 |
| 4. | Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Malinau. | 0,15 | 4 | 0,125 |
| 5. | Lembaga pendukung pendidikan, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. | 0,15 | 4 | 0,150 |
| 6. | Kebudayaan lokal yang hidup dalam masyarakat Malinau sebagai wujud kearifan dan keunggulan lokal. | 0,15 | 3 | 0,125 |
| 7. | Sistem Teknologi Informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan zaman (<i>up to date</i>) dan teknologi. | 0,10 | 3 | 0,125 |
| | | 100 | | 1,015 |

Sumber: Dinas Pendidikan

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan, dimana *reward and punishment* belum menjadi bagian utama dalam indikator keberhasilan kinerja.
2. Keterbatasan wewenang dan urusan dari Dinas Pendidikan yang secara umum masih berperan sebagai fasilitator maupun regulator.
3. Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal dibidang pendidikan baik dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia.
4. Pengkoordinasian serta pensinkronisasian program kegiatan Dinas Pendidikan yang belum optimal.
5. Rendahnya angka capaian keberhasilan kualitas pendidikan ditataran nasional maupun internasional sehingga belum mampu bersaing dalam persaingan global.
6. Belum adanya kebiasaan untuk berpikir “*outside the box*” yang mampu memberikan sumbangan pemikiran yang inovatif dan kreatif.
7. Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang terbatas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 2.10
Identifikasi dan Analisis Kelemahan (*Strengths*)
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

| No. | Indikator | Potensi | Skor | Skor Tertimbang |
|-----|---|---------|------|-----------------|
| 1. | Belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan, dimana <i>reward</i> and <i>punishment</i> belum menjadi bagian utama dalam indikator keberhasilan kinerja | 0,15 | 4 | 0,125 |
| 2. | Keterbatasan wewenang dan urusan dari Dinas Pendidikan yang secara umum masih berperan sebagai fasilitator maupun regulator. | 0,10 | 3 | 0,125 |
| 3. | Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia | 0,15 | 2 | 0,125 |
| 4. | Pengkoordinasian serta sinkronisasi program kegiatan Dinas yang belum optimal. | 0,15 | 2 | 0,150 |
| 5. | Rendahnya angka capaian keberhasilan kualitas pendidikan ditataran nasional maupun internasional sehingga belum mampu bersaing dalam persaingan global.. | 0,15 | 3 | 0,125 |
| 6. | Belum adanya kebiasaan untuk berpikir “ <i>outside the box</i> ” yang mampu memberikan sumbangan pemikiran yang inovatif dan kreatif. | 0,15 | 4 | 0,150 |
| 7. | Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang terbatas dalam penyelenggaraan pendidikan | 0,15 | 2 | 0,175 |
| | | 100 | | 0,705 |

Sumber: Dinas Pendidikan

2. Analisis Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Malinau sebagai Kabupaten Konservasi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia menjadikan Malinau sebagai tempat tujuan dan pusat penelitian IPTEK;
2. Kondisi lingkungan Kabupaten Malinau yang kondusif, aman, damai dengan dukungan karakter budaya masyarakat yang tenang;

3. Kebudayaan dan adat istiadat Dayak yang menjunjung tatanan kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai, serta hidup dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong;
4. Adanya kepedulian dan apresiasi masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan formal maupun informal;
5. Persamaan Persepsi diantara pemangku kebijakan (stakeholders) dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Malinau;
6. Perkembangan arus informasi dan telekomunikasi dalam mendukung kemajuan bidang pendidikan;
7. Perhatian dan apresiasi dari pemerintah dan dunia usaha terhadap kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan Kabupaten Malinau.

Tabel 2.11
Identifikasi dan Analisis Peluang (*Opportunities*)
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

| No. | Indikator | Potensi | Skor | Skor Tertimbang |
|------------|---|----------------|-------------|------------------------|
| 1. | Malinau sebagai Kabupaten Konservasi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia menjadikan Malinau sebagai tempat tujuan dan pusat penelitian IPTEK; | 0,15 | 4 | 0,145 |
| 2. | Kondisi lingkungan Kabupaten Malinau yang kondusif, aman, damai dengan dukungan karakter budaya masyarakat yang tenang. | 0,15 | 4 | 0,125 |
| 3. | Kebudayaan dan adat istiadat Dayak yang menjunjung tatanan kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai, serta hidup dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong. | 0,15 | 4 | 0,135 |
| 4. | Adanya kepedulian dan apresiasi masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan formal maupun informal. | 0,15 | 4 | 0,145 |
| 5. | Persamaan Persepsi diantara pemangku kebijakan (stakeholders) dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Malinau. | 0,15 | 3 | 0,145 |
| 6. | Perkembangan arus informasi dan telekomunikasi dalam mendukung kemajuan bidang pendidikan. | 0,15 | 4 | 0,145 |

| | | | | |
|----|---|------|---|-------|
| 7. | Perhatian dan apresiasi dari pemerintah dan dunia usaha terhadap kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Malinau. | 0,10 | 3 | 0,145 |
| | | 100 | | 0,985 |

Sumber : Dinas Pendidikan

b. Ancaman (*Threats*)

1. Arus globalisasi dan modernisasi di bidang telekomunikasi
2. Faktor geografis Kab. Malinau yang menyulitkan dalam pembangunan Pendidikan;
3. Menipisnya nilai-nilai budaya pada generasi muda, yang berpikir praktis dan pragmatis;
4. Adanya biaya tinggi (*high cost*) dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan
5. Sumber daya aparatur tenaga pendidik yang kurang siap ditempatkan di daerah terpencil dan jauh terisolir;

Tabel 2.12
Identifikasi dan Analisis Ancaman (*Threats*)
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

| No. | Indikator | Potensi | Skor | Skor Tertimbang |
|-----|---|---------|------|-----------------|
| 1. | Arus globalisasi dan modernisasi di bidang telekomunikasi. | 0,20 | 4 | 0,125 |
| 2. | Faktor geografis Kab. Malinau yang menyulitkan dalam pembangunan Pendidikan. | 0,20 | 4 | 0,125 |
| 3. | Menipisnya nilai-nilai budaya pada generasi muda, yang berpikir praktis dan pragmatis. | 0,20 | 4 | 0,125 |
| 4. | Adanya biaya tinggi (<i>high cost</i>) dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan | 0,20 | 4 | 0,128 |
| 5. | Sumber daya aparatur tenaga pendidik yang kurang siap ditempatkan di daerah terpencil dan jauh terisolir. | 0,20 | 4 | 0,125 |
| | | 100 | | 0,628 |

Sumber : Dinas Pendidikan

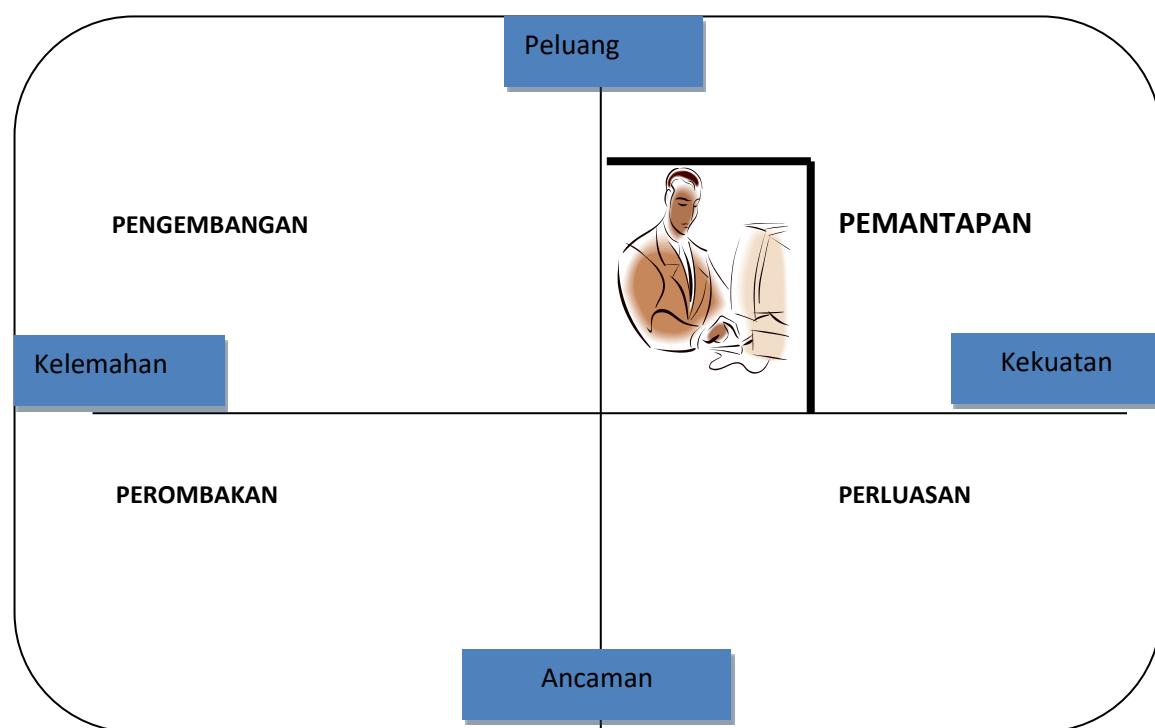
B. Matriks Posisi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Tupoksi

Memperhatikan hasil dari analisis SWOT seperti tertera di atas serta berdasarkan pada visi dan misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Malinau, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.13
Posisi Dinas Pendidikan Kab. Malinau

| Indikator | Skor Tertimbang | Indikator | Skor Tertimbang |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| KEKUATAN | 1,015 | PELUANG | 0,985 |
| KELEMAHAN | 0,705 | ANCAMAN | 0,628 |
| KESEIMBANGAN | 0,310 | KESEIMBANGAN | 0,357 |

Gambar Posisi dan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau



C. Asumsi Pilihan dan Pilihan Strategis

Memperhatikan hasil dari analisis SWOT seperti tertera di atas serta berdasarkan pada visi dan misi yang diemban sebagai kriteria, maka dihasilkan asumsi pilihan strategis sebagai berikut:

1. Kembangkan serta tingkatkan kepercayaan masyarakat termasuk masyarakat di luar Kabupaten Malinau bahwa Pendidikan di Kabupaten Malinau dapat dijamin kualitas pelayanan pendidikannya melalui peningkatan kualitas di semua sumberdaya pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan.
2. Kembangkan dan manfaatkan apresiasi masyarakat Kabupaten Malinau yang cukup baik terhadap pendidikan untuk mendukung terciptanya lembaga pendidikan yang kompetitif dan lingkungan yang kondusif.
3. Tingkatkan kualitas profesionalisme dan komitmen aparat dinas, penyelenggara lembaga pendidikan serta tingkatkan manajemen pendidikan di Kabupaten Malinau.
4. Tumbuh kembangkan moral kerja pada semua sumber daya manusia pendidikan dengan menerapkan “reward and punishment” untuk memperoleh SDM yang berkualitas kompetitif.
5. Manfaatkan dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Organisasi Swasta lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
6. Tingkatkan koordinasi dan sinkronisasi disemua program pendidikan baik antar pemerintah, lembaga pendidikan maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk menghindari pemborosan biaya, waktu, dan tenaga serta mengantisipasi perkembangan persaingan.
7. Memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya pendidikan yang berdaya saing tinggi.
8. Cipta dan kembangkan pusat informasi pendidikan dan promosi pendidikan.
9. Manfaatkan hasil penelitian yang komprehensif dalam penerapan kebijakan baru, untuk menghindari bongkar pasang kebijaksanaan.
10. Adakan “Penilaian penyelenggaraan pendidikan” di tingkat daerah untuk mengetahui kelayakan sebuah institusi pendidikan yang berkualitas.
11. Ciptakan kegiatan yang dapat berlangsungnya akulturasi budaya antara pendatang dan tuan rumah, sehingga tercipta saling pengertian.
12. Penerapan dan penggunaan nilai-nilai budaya sebagai kearifan dan keunggulan lokal dalam pendidikan, sehingga membentuk anak-anak didik yang memiliki kekhasan dan karakter berbudaya yang adiluhur.
13. Adakan kampanye anti napza dan penyakit masyarakat lainnya serta tegakkan supremasi hukum.

14. Dorong dan fasilitasi terciptanya lingkungan masyarakat yang kondusif terhadap pendidikan dan ikut menjadikan lingkungan yang siap bersaing.

Dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Malinau yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :
 1. Sumber daya (masyarakat) pendidikan belum siap mengantisipasi persaingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
 2. Hubungan yang harmonis dan selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum tercipta.
 3. Kesadaran hukum dan tingkat ketaatan dan kepatuhan masyarakat akan hukum masih belum terbentuk dengan sempurna.
 4. Kesulitan dalam masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi dan mengurangi masalah napza dan penyakit masyarakat lainnya, karena kurangnya kesatuan rasa dan sepenanggungan tindakan sebab akibat.
 5. Kurang optimalnya pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam pendidikan dimana kemudahan akses memperoleh system informasi teknologi masih digunakan hanya sebatas chatting maupun browsing situs-situs non pendidikan.
- b. Faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :
 1. Adanya hubungan yang baik antar Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota).
 2. Adanya dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Organisasi Swasta lain sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
 3. Ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
 4. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
 5. Ketersediaan Sistem Informasi Pendidikan.

6. Nilai-nilai luhur dari budaya dan kearifan lokal yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai dasar membentuk dan mewujudkan karakter dan budi pekerti luhur dari anak-anak didik.
7. Peningkatan SDM yang professional dan kompeten dengan penerapan system “*reward and punishment*” yang berkeadilan.
8. Jalinan hubungan dan dukungan yang harmonis dan sinkron dari semua sumber daya pendidikan yang ada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB II), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

Angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Malinau untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tercatat masih rendah yang menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau terutama di daerah pedalaman dan perbatasan.

Perluasana jangkauan dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Malinau sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Sampai tahun 2015 ketersediaan jumlah sekolah dan guru untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs masih belum memadai sehingga dapat menghambat pelayanan pendidikan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

Pelayanan pendidikan tinggi di Politeknik Kabupaten Malinau terus berkembang. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan lulusan politeknik dan belum berkembangnya kerjasama dengan perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Malinau

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan,
- b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius,. dapat kita lihat ada kesenjangan (gap) yang cukup lebar antar kecamatan dan hal ini perlu ada intervensi yang serius dari pemerintah kabupaten agar kesenjangan

- tersebut tidak terlalu lebar dengan cara menambah daya tampung dan membuka unit-unit sekolah baru di kecamatan-kecamatan yang capaian indikatornya masih jauh dari harapan.
- c. Peningkatan perluasan akses dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius, hal ini bisa kita lihat dari beberapa indikator yang sebarannya masih terjadi kesenjangan antar kecamatan,
 - d. Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indikator makro yang menjadi bagian dari indikator kabupaten termaju dan juga menjadi bagian dari komponen indikator pendidikan, indikator tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah(RRLS).
 - e. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan,

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN”**, adapun misinya adalah :

- (1) Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
- (2) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi;
- (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, pedalaman maupun perbatasan dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu jalan air bersih, listrik telekomunikasi dan informasi;

- (4) Meningkatkan Perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada *ekonomi kerakyatan* yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu BUMDes, Pasar bank dan pusat perdagangan;
- (5) Meningkatkan peran Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan) dalam perekonomian daerah melalui pengembangan produk unggulan desa “one village one product” dengan semboyan “bertani sehat”;
- (6). Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat industri barang dan jasa, melalui perencanaan tata kota secara konprehensif dengan membangun infrastruktur perkotaan, jaringan transportasi darat, sungai dan udara;
- (7). Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribada menurut agama masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
- (8). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi, melalui penanaman pohon produktif, dalam berkebun dengan semboyan : Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;
- (9). Mewujudkan Supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelolah pemerintahan yang bebas Koroupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (10). Meningkatkan peran Pemuda dan perempuan dalam pembangunan Daerah., melalui peran perempuan dan pemuda desa dalam setiap kegiatan pembangunan;
- (11). Mengembangkan Seni Budaya dan Pariwisata Daerah dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah melalui pendidikan dan pelatihan;
- (12) Memantapkan kapasitas pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat,

Dari dua belas misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor pendidikan terdapat pada :

Misi ke-satu. dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan sasaran (a) meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah; (b) meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah; (c) meningkatkan minat baca masyarakat.

Misi ke sembilan, dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai (1) meningkatkan administrasi pemerintahan, dengan sasaran (a) terwujudnya administrasi pemerintahan yang efesien dan efektif; (b) terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (c) terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan (2) meningkatkan kinerja pelayanan public, dengan sasaran terwujudnya pelayanan public yang cepat mudah, bermutu dan adil.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Utara

Visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019 **“TERBENTUKNYA INSAN SERTA EKOSISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER DENGAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**, yang terdiri dari lima misi, yaitu :

- (1). Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
- (2). Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan
- (3). Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
- (4). Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
- (5). Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan public.

Dalam enam tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor pendidikan terdapat pada :

Tujuan 1 : penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan aparatur institusi pendidikan dalam eksosistem pendidikan, dengan sasaran (a). meningkatkan perilaku positif siswa, (b) meningkatkan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan (c) meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual dan social

Tujuan 3 : Peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Anak berkebutuhan khusus, dengan sasaran (a) meningkatnya akses pendidikan

anak usia dini dan pendidikan masyarakat diseluruh provinsi, kabupaten dan kota (b) meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Tujuan 4 : peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, dengan sasaran (a) meningkatnya mutu PAUD dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (b) meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah (c) meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan (d) meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga,

Tujuan 6 : peningkatan system tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan public, dengan sasaran (a) meningkatkan akuntabel kinerja (b) meningkatnya pelibatan public dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan.

3.4. Telaah dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Kabupaten Malinau sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau terutama menyangkut penetapan pola dan struktur tata ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah kecamatan.RPJMD Kabupaten Malinau memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di Kabupaten Malinau secara berkelanjutan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2016-2021.

Hubungan KLHS terhadap Rancangan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 juga dimaksudkan untuk menjadi masukan dan pertimbangan bagi aparat Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memperbaiki Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan pembangunan yang akan dicantumkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten Malinau

Pengkajian isu strategis merupakan langkah awal sebelum mengkaji secara rinci pengaruh tiap kebijakan, rencana dan program (KRP) RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malinau terhadap pembangunan berkelanjutan. Proses tersebut dilakukan setelah proses identifikasi stake holder dan KRP terkait isu-isu strategis di wilayah Kabupaten Malinau. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada sudut pandang aspek lingkungan hidup. Dalam pendekatan ini KLHS diselenggarakan sebagai proses yang terpisah dengan sistem AMDAL dan menggunakan prosedur dan pendekatan yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai atau memiliki karakteristik sebagai penilaian lingkungan. Pola kelembagaan semacam ini terbentuk karena terkait dengan proses pengambilan keputusan di Parlemen atau Kabinet. Dalam beberapa kasus, KLHS diselenggarakan sebagai bagian dari penilaian yang lebih luas atau sebagai bagian dari uji kebijakan yang lain.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan penelaahan isu-isu strategis yang memiliki fokus sama, maka akan diperoleh beberapa KRP dalam hubungannya dengan isu-isu strategis lingkungan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Malinau (2011 – 2031)

Kajian Pengaruh Kebijakan, Rencana Dan Program Terhadap Pembangunan Berkelanjutan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Malinau yang dianggap penting dan berpengaruh bagi pembangunan berkelanjutan.

Dari 9 (Sembilan) kebijakan rencana dan program yang diidentifikasi dalam hubungannya dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan setelah melalui proses kajian diperoleh 7 (tujuh) KRP yang secara holistik mempengaruhi pembangunan sehingga perlu ditelaah lebih lanjut guna mengetahui tingkat signifikansi dampak yang ditimbulkan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah: (1) telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir; (2) telaahan terhadap sasaran rencana pembangunan nasional periode tahun 2015-2019; (3) implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah kabupaten malinau terhadap layanan pendidikan; (4) permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

- 1) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
- 2) Penyebaran saran pendidikan yang belum merata;
- 3) Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang;
- 4) Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
- 5) Implementasi kurikulum 2013.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan dengan program unggulan daerah yaitu wajib belajar 16 (enam belas) tahun dengan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah
2. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)
3. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana)
4. Peningkatan Angka Melek Huruf
5. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Dalam rangka merealisasikan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya kinerja administrasi pemerintahan;

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah;
3. Meningkatkan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif;
4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

| | | | | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|--|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | | | | | |
| 1. | Meningkatnya kinerja administrasi pemerintahan | 1. Meningkatkan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif. | Persentase Administrasi Perkantoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | |
| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | | | | | |
| | | 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel | Persentase Laporan Dinas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | |
| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | | | | | |
| 2. | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 1. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah | Angka Partisipasi Murni (APM) /Persentase - SD/MI - SMP/MTs | 96,28 76,71 | 96,29 76,72 \\ | 96,30 76,73 | 96,32 76,74 | 96,33 76,78 |
| | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) /Persentase - APS 7-12 Tahun - APS 13-15 Tahun | 99,33 90,69 | 99,34 90,70 | 99,36 90,71 | 99,37 90,72 | 99,38 90,74 |
| | | | Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 8,48 | 8,97 | 9,56 | 9,87 | 10,20 |

| | | | Persentase Angka Melek Huruf | 83,14 | 83,25 | 83,36 | 83,57 | 83,88 |
|-----|--------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | | | | | |
| | | 2. Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah | Persentase Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs | 100 98,98 | 100 99,00 | 100 99,01 | 100 99,03 | 100 99,04 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pada Dinas Pendidikan maka strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pembinaan secara berjenjang dari level staf s.d pejabat eselon menurut tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.
3. Peningkatan pemanfaatan IT yang membantu dalam penyediaan data kependidikan.
4. Pembinaan dan peningkatan mutu tenaga pendidik
5. Mengadakan pemetaan antara rasio jumlah guru dengan tingkat kebutuhan sekolah akan guru di wilayah kecamatan dan desa
6. Alokasi anggaran pendidikan menurut aturan dan Undang-Undang yang berlaku.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik diberbagai jenjang dan jenis pendidikan
8. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur secara merata.
9. Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas kelengkapan sekolah secara merata
10. Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.
11. Peningkatan kelengkapan pendukung belajar mengajar dalam pencapaian prestasi peserta didik.

Adapun kebijakan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah :

- Pemberian tugas dan tanggung jawab menurut tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan kepada aturan dan hukum yang berlaku
- Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan public kependidikan
- Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh *stakeholder* dan masyarakat secara luas.

- Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.
- Penuntasan wajib belajar 16 tahun yang menjadi salah satu program unggulan daerah.
- Peningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul.
- Peningkatan sarana dan prasarana sekolah secara kontinyu, bertahap, berdasarkan kebutuhan prioritas
- Peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan.
- Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

| Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN | | | |
|---|---|---|---|
| Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat | Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah | Pembinaan dan peningkatan mutu tenaga pendidik | Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi. |
| | | Peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik diberbagai jenjang dan jenis pendidikan | Penuntasan wajib belajar 16 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan |
| | | Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas kelengkapan sekolah secara merata | Peningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah | Mengadakan pemetaan antara rasio jumlah guru dengan tingkat kebutuhan sekolah akan guru di wilayah kecamatan dan desa | Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi. |
| | | Alokasi anggaran pendidikan menurut aturan dan undang-undang yang berlaku . | Penuntasan wajib belajar 16 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan. |
| | | Peningkatan dan pengembangan infrastruktur secara merata | Peningkatan sarana dan prasarana sekolah secara kontinyu, bertahap, berdasarkan kebutuhan prioritas |
| | | Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar | Peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan |
| | | Peningkatan kelengkapan pendukung belajar mengajar dalam pencapaian prestasi peserta didik. | Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak |

Misi 9 : Mewujudkan Supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelolah pemerintahan yang bebas Koroupsi, Kolusi dan Nepotisme

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah \Kebijakan |
|--|--|--|---|
| Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan | Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efesien dan efektif | Peningkatan pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Pemberian tugas dan tanggung jawab menurut tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan kepada aturan dan |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | hukum yang berlaku |
| | | Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik. | Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan public kependidikan |
| | Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel | Peningkatan pemanfaatan IT yang membantu dalam penyediaan data kependidikan | Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh <i>stakeholder</i> dan masyarakat secara luas. |

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Dalam mencapai target kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menyusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif,

Sasaran RPJMD Yang Berhubungan dengan Tupoksi Dinas Pendidikan Kab. Malinau

| | Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | Indikator Kinerja |
|------------------|---|--|
| Misi Ke-1 | Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik | |
| Tujuan | Meningkatkan derajat pendidikan Masyarakat | |
| Sasaran | Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah | APS SD/MI APS SMP/MTs APM SD/MI APM SMP/MTs Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka kelulusan SD/MI Angka kelulusan SMP/MTs |
| Misi Ke-9 | Mewujudkan Supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. | |
| Tujuan | Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan | |
| Sasaran | Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel | Persema-tase SKPD dengan status laporan kinerja baik Percentase SKPD dengan laporan keuangan baik sesuai dengan aturan yang berlaku |

T a b e l 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau
Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Malinau

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif (dalam juta) | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | Unit kerja penanggung jawab | Lokasi |
|--|---|--|------|--|--|--|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|---|-----------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| Meningkatkan Kinerja Administrasi Pemerintah | Pesertase Kinerja administrasi Pemerintahan | Terwujudnya administrasi Pemerintahan yang efesien dan efektif | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 75,64 2.370.941.444,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | % | | 100 | 263 | 100 | 70 | 100 | 50 | 100 | 70 | 100 | 70 | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | % | | | | 100 | 100 | ## | 100 | 198 | 100 | 150 | 100 | 150 | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | % | | 100 | 150 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 45 | 100 | 45 | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | % | | 100 | 124 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | % | | 100 | 475 | 100 | ## | 100 | 600 | 100 | 985 | 100 | 1200 | Dinas Pendidikan | Malinau | |
| | | | | Penunjang Administrasi Pemerintah | % | | 100 | 677 | 100 | ## | 100 | 365 | 100 | 520 | 100 | 520 | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | | Pemeliharaan dan Perawatan Barang Inventaris Kantor | % | | 100 | 28 | 100 | 75 | 100 | 45 | 100 | 65 | 100 | 65 | Dinas Pendidikan | Malinau | |
| | | | | Penyediaan Jasa Cleaning Service pada Dinas Pendidikan | % | | 100 | 149 | 100 | ## | 100 | 198 | 100 | 198 | 100 | 198 | Dinas Pendidikan | Malinau | |
| | | | | Penunjang Administrasi BOS/BOSDA Jenjang SD/Mi | % | | 100 | 186 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Malinau | |
| | | | | Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru | % | | 100 | 35 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Malinau | |
| | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 Tahun | 99,76 1.100.673.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor | % | | | - | 100 | 36 | 100 | 40 | 100 | 175 | 100 | 90 | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | | Terwujudnya pengolahan keuangan daerah yang akuntabel | Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan | 1 Tahun | 0 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyusunan Data dan Dokumen Perencanaan | % | | | | 100 | 99 | 100 | 69 | 100 | 95 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan | % | | | | | | 100 | 58 | 100 | 140 | 100 | 150 | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|-----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----|------------------|------------------|--------------|
| Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat | Tingkat derajat pendidikan masyarakat | Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 1 Tahun | 91,50 244.380.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bantuan Operasional Penyeleenggaraan (BOP) TKN Patama | Jumlah Sekolah | | 1 Sekolah | 36 | 1 Sekolah | 40 | 1 Sekolah | 36 | 1 Sekolah | 54 | 1 Sekolah | 54 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Bantuan Operasional Penyeleenggaraan (BOP) TKN Wana Kencana | Jumlah Sekolah | | 1 Sekolah | 36 | 1 Sekolah | 40 | 1 Sekolah | 36 | 1 Sekolah | 39 | 1 Sekolah | 39 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Penunjang Administrasi Peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD ke S1 | Jumlah Kegiatan | | 1 keg. | 45 | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Penunjang Administrasi, Operasional dan insentif PAUD | Jumlah Kegiatan | | 1 keg. | 99 | 1 keg | 20 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Penunjang Administrasi BOP PAUD | Jumlah Kegiatan | | 1 keg. | 44 | 1 keg | 30 | 1 keg | 75 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Penunjang Administrasi BOP PAUD dan BOSDA | Jumlah Kegiatan | | | | | | | | 1 keg | 200 | 1 keg | 200 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Dana BOSDA TK Pratama Kecamatan Malinau Kota | Jumlah Sekolah | | 1 Sekolah | 31 | 1 Sekolah | 31 | 1 Sekolah | 30 | 1 Sekolah | 31 | 1 Sekolah | 31 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Dana BOSDA TK Wana Kencana Kecamatan Malinau Barat | Jumlah Sekolah | | 1 Sekolah | 25 | 1 Sekolah | 25 | 1 Sekolah | 22 | 1 Sekolah | 22 | 1 Sekolah | 22 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Menov Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD | Jumlah Kegiatan | | | | | | | 75 | 1 keg | 240 | 1 keg | 240 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | DAPODIK PAUDNI | Jumlah Dokumen | | 1 dokumen | 117 | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Pelatihan Kurikulum 2013 jenjang PAUD | Jumlah Guru | | | 60 Guru | ## | | | 60 Guru | 300 | 60 Guru | 300 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Akreditasi PAUD dan PNF | Jumlah Lembaga | | | 15 Lembaga | ## | 15 Lembaga | 71 | 20 Lembaga | 147 | 20 Lembaga | 220 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Diklat Lanjutan Tutor PAUD | Jumlah Guru | | | | 40 Guru | 125 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Diklat Dasar PAUD | Jumlah Guru | | | | | | | 80 Guru | 250 | 80 Guru | 250 | | | | |
| | | | Penunjang Oprasional dan Isentif PTK PAUD-PNF | Jumlah PTK | | | | | | 521 PTK | 90 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Pelatihan Operator Dapodik PAUD Dikmas/Non Formal | Jumlah Operator | | | | | | 50 Operator | 100 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Penunjang Administrasi Peningkatan Kualifikasi S1 PAUD PNF | Jumlah Guru | | | | | | 39 Guru | 45 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Sertifikasi S1 Guru PAUD | Jumlah Guru | | | | | | | | 15 Guru | 150 | 15 Guru | 150 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 1 Tahun | 64.02 10.455.703.545,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dana Bosda SD | Jumlah Sekolah | | 103 sekolah | ## | 102 sekolah | 8,325 | 102 sekolah | 8418 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Dana BOSDA SMP | Jumlah Sekolah | | | 35 Sekolah | 4,229 | 35 Sekolah | 4302 | | | | | | Dinas Pendidikan | | |
| | | | Dana BOSDA SD dan SMP | Jumlah Sekolah | | | | | | | 1 Sekolah | 13500 | 1 Sekolah | 13500 | | Dinas Pendidikan | | |
| | | | Relokasi SMAN 1 Malinau (SMA Kebangsaan) | Jumlah Sekolah | | 1 Sekolah | ## | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Relokasi SMPN 1 Malinau | Jumlah Sekolah | | 1 Sekolah | ## | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | DAK Bidang Pendidikan | Jumlah Kegiatan | | 1 Kegiatan | ## | 1 Kegiatan | 1,216 | | 1 Kegiatan | 8000 | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Pelaksanaan US dan UN SD/MI dan SMP/MTs dan Paket A, B,C | Jumlah Kegiatan | | 6 Kegiatan | 76 | 5 Kegiatan | 848 | 5 Kegiatan | 850 | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Evaluasi Belajar Sekolah | Jumlah Kegiatan | | 1 kegiatan | 898 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Penunjang Administrasi dan Beasiswa Miskin dan Berprestasi tingkat SD,SMP,SMA/SMK dan Mandiri | Jumlah Kegiatan | | 1 kegiatan | 98 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | DAPODIK SD | Jumlah Kegiatan | | 1 kegiatan | 197 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Olimpiade Sain nasional (OSN) dan Lomba Akademik Tingkat SD dan SMP | Jumlah Kegiatan | | 2 Kegiatan | 246 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP | Jumlah Jenjang Sekolah | | 2 Jenjang Sekolah | 295 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI dan SMP/MTs | Jumlah Jenjang Sekolah | | 2 Jenjang Sekolah | 334 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Penunjang Administrasi BOS/BOSDA Jenjang SD/MI dan SMP/MTs | Jumlah Sekolah | | | 137 sekolah | 175 | 137 sekolah | 195 | 137 sekolah | 300 | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Pembangunan RKB SDN 004 Kayan Selatan | Jumlah Ruang | | | 6 Ruang | 3,249 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Landscape dan Fasilitas Eks SMA Kebangsaan | Jumlah Sekolah | | | 1 Sekolah | 755 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Eks SMA Kebangsaan | Jumlah Sekolah | | | 1 Sekolah | 142 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|------------|-------|----------|--------|------------|-------|--|--|------------------|--------------|
| | | | Landscape dan Fasilitas SMPN 1 Malinau | Jumlah Sekolah | | | 1 Sekolah | 267 | 12 Bulan | 13,685 | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan SD Kecil Sengayan | Jumlah Dokumen | | | 1 Dokumen | 50 | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan SD Kecil Dumu Mahak | Jumlah Dokumen | | | 1 Dokumen | 50 | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | DAK Affirmasi Bidang Pendidikan | Jumlah Rumdin | | | 2 Rumdin | 265 | 6 Rumdin | 1,070 | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | DAK Reguler Bidang Pendidikan | Jumlah Ruang | | | 12 RKB | 4,683 | 27 RKB | 7,058 | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Lanscape SDN 003 Malinau Utara | Jumlah Kegiatan | | | 1 Kegiatan | 35 | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Penimbunan Landscape SDN 003 Malinau Utara | Jumlah Kegiatan | | | 1 Kegiatan | | | 1,075 | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Pemasangan Keramik dan Plafon SDN 005 Malinau Kota | Jumlah Kegiatan | | | | | | | 1 Kegiatan | 234 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Perencanaan dan Pembangunan Landscape dan Penimbunan Halaman SDN 008 Malinau Utara | Jumlah Kegiatan | | | | | | | 1 Kegiatan | 980 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan Gedung SDN 008 Mentarang Hulu | Jumlah Ruang | | | | | | | 6 Ruang | 2,100 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan RKB SDN 005 Bahau Hulu | Jumlah Ruang | | | | | | | 6 RKB | 2,560 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan RKB SDN 003 Mentarang Hulu | Jumlah Ruang | | | | | | | 3 RKB | 750 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan Gedung SMP 3 Kayan Selatan | Jumlah Kegiatan | | | | | | | 1 Kegiatan | 2,500 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan RKB SDN 005 Sungai Tubu | Jumlah Ruang | | | | | | | 4 ruang | 1,550 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Relokasi Pembangunan Gedung SMP 3 Malinau Utara | Jumlah Ruang | | | | | | | 3 ruang | 2,000 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan RKB SDN 007 Pujungan | Jumlah Ruang | | | | | | | 3 ruang | 890 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan Jamban/Toilet siswa SMPN 2 Malinau Kota | Jumlah unit | | | | | | | 1 unit | 160 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan SD Kecil Sengayan | Jumlah Kegiatan | | | | | | | 1 Kegiatan | 1,420 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan SDN 005 Malinau Selatan Hulu | Jumlah Kegiatan | | | | | | | 1 Kegiatan | 300 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan RKB SDN 004 Bahau Hulu | Jumlah Ruang | | | | | | | 3 Lokal | 890 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pengadaan Meja Kursi siswa SMPN 1 Malinau selatan | Jumlah Kegiatan | | | | | | | 1 Kegiatan | 150 | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pengadaan Meja Kursi siswa SDN 001 Malinau selatan | Jumlah Kegiatan | | | | | | | 1 Kegiatan | 90 | | | Dinas Pendidikan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|--|------------|----|--|--|------------|-------|---------|--------|--|------------------|------------------|
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 005 Kayan Hulu | Jumlah Kopel | | | | | | 2 Kopel | 1.630 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan Kantor SMPN 3 Mentarang | Jumlah unit | | | | | | 1 Unit | 500 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 008 Mentarang Hulu | Jumlah Kopel | | | | | | 2 Kopel | 915 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 007 Mentarang Hulu | Jumlah Kopel | | | | | | 1 Kopel | 515 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 007 Pujungan | Jumlah Kopel | | | | | | 1 Kopel | 415 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan SD Kecil Dumu Mahak | Jumlah Kegiatan | | | | | | 1 Kegiatan | 1.620 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan RKB SMPN 4 Malinau Utara | Jumlah Ruang | | | | | | 2 ruang | 830 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan Perpustakaan SMPN 4 Malinau Barat | Jumlah unit | | | | | | 1 Unit | 650 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan RKB SDN 004 Malinau Selatan Hilir | Jumlah Ruang | | | | | | 3 RKB | 1.380 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan Kantor SDN 003 Sungai Boh | Jumlah unit | | | | | | 1 Unit | 512 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan Kantor SDN 004 Sungai Boh | Jumlah unit | | | | | | 1 Unit | 512 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan Kantor SDN 005 Sungai Boh | Jumlah unit | | | | | | 1 Unit | 512 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan Lab. Komputer SMPN 1 Malinau Utara | Jumlah unit | | | | | | 1 Unit | 570 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Perencanaan Rehab Total SMPN 1 Malinau Utara | Jumlah unit | | | | | | 1 Unit | 350 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Relokasi Pembangunan SDN 002 Kayan Hilir | Jumlah Ruang | | | | | | 3 Ruang | 1.643 | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Pembangunan RKB Sekolah | Jumlah Ruang | | | | | | | | 42 RKB | 26.000 | | | Dinas Pendidikan |
| | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah unit | | | | | | | | 5 Unit | 2.800 | | | Dinas Pendidikan |
| | | | Pembangunan Lab Sekolah | Jumlah unit | | | | | | | | 10 Unit | 4.700 | | | Dinas Pendidikan |
| | | | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah unit | | | | | | | | 7 Unit | 3.500 | | | Dinas Pendidikan |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Kepsek dan Guru | Jumlah Kopel | | | | | | | | 8 Kopel | 7.200 | | | Dinas Pendidikan |
| | | | Program Pendidikan Menengah | 1 Tahun | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dana BOSDA SMP | Jumlah Sekolah | | 34 Sekolah | ## | | | | | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas guru SMP 1 Kecamatan sungai Tubu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SD Ranau Kecamatan Sungai Tubu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Kab. Malinau | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------|--|-----------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------------|
| | | | Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas guru SMP 3 Kecamatan Malinau Selatan Hilir (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SD Long Nyau Kecamatan Sungai Tubu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas guru SMP 2 Kecamatan pujungan (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SD Halanga Kecamatan Malinau Selatan Hulu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Kantor SMP 1 Kecamatan sungai Tubu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 44 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SD Laban Nyarit Kecamatan Malinau Selatan (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Kantor SMP 3 Kecamatan Malinau Selatan Hilir (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 44 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SD Nahak kramo Kecamatan Malinau Selatan Hulu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 50 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Kantor SMP 2 Kecamatan Pujungan (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 45 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SDN 008 Long kebinu Kecamatan Mentarang hulu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 005 Kecamatan Bahau Hulu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SDN 007 Kecamatan Pujungan (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 007 Kecamatan Pujungan (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SDN 005 Kecamatan Bahau hulu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|--|-----------|----|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------------|
| | | | Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN long uli Kecamatan Bahau Hulu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 46 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 005 Kecamatan Kayan hulu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 008 Long kebinu Kecamatan Mentarang Hulu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SD Ranau Kecamatan Sungai Tubu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SDN 005 Kecamatan Malinau Selatan Hilir (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SD Long nyau Kecamatan Sungai Tubu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Kantor guru SD 004 Kecamatan Sungai Boh (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor SDN 005 Kecamatan Sungai Tubu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 50 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SDN 005 Kecamatan Malinau Kota (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 44 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SDN 005 Kecamatan Sungai Boh (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SDN 002 Kecamatan Malinau Barat (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SDN 004 Kecamatan Kayan Selatan (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 004 Kecamatan Sungai Boh (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 003 Kecamatan Sungai Boh (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 50 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|----------------------------|------------|-----|--|--|--|--|------------|-------|------------|-------|------------------|------------------|--------------|
| | | | Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 005 Kecamatan Malinau Selatan hilir (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SDN 003 Kecamatan sungai Boh (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SMP 2 Kecamatan Pujungan (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 46 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SMP 3 Kecamatan Malinau Selatan hilir (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SMP 3 Kecamatan Malinau Utara (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Perencanaan Pembangunan RKB SMP 1 Kecamatan sungai Tubu (2016) | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 51 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Akreditasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) | Jumlah Kegiatan | | 1 kegiatan | 44 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | DAPODIK SMP | Jumlah Kegiatan | | 1 kegiatan | 193 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Liga Pelajar Indonesia (LPI) | Jumlah Kegiatan | | 1 kegiatan | 186 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah | Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1 Tahun | 79,10 21.961.332.073,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penunjang Admnristrasi Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS pada Sekolah Swasta dan Negeri | Jumlah Kegiatan | . | 1 Kegiatan | ## | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak | Jumlah Kegiatan | | 1 Kegiatan | ## | | | | | 1 Kegiatan | 17512 | 1 Kegiatan | 17512 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD,SMP,SMA/SMK | Jumlah Kegiatan | | 1 Kegiatan | 15 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | LPI SMP dan SMA | Jumlah Kegiatan | | 1 Kegiatan | 158 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Operasional Pengawas Sekolah | Jumlah Kegiatan | | 1 Kegiatan | 27 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | PORPROP (9 Cabor) | Jumlah Cabor | | 9 Cabor | 3 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|--|------------|--------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------|-------------------------|------|------------------|------------------|--------------|
| | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA 8 Malinau | Jumlah Ruang | | 3 ruang | ## | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Rekrutmen dan pelatihan Kepala Sekolah dan calon kepala Sekolah | Jumlah Kepsek | | 62 Org | 428 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Tambahan Penghasilan Guru Non PNS (Bankeu Prov) | Jumlah Kegiatan | | 1 Kegiatan | ## | 1 Kegiatan | 3,288 | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Penunjang Admnistrasi Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD ke S1 | Jumlah PTK | | | 40 PTK | 263 | | | 80 PTK | 700 | 80 PTK | 700 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Sertifikasi Guru | Jumlah Guru | | | 120 Guru | 138 | | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru | Jumlah Kegiatan | | | 1 Kegiatan | 150 | 1 Kegiatan | 98 | 1 Kegiatan | 200 | 1 Kegiatan | 200 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Pelatihan Kurikulum 13 Jenjang SD dan SMP | Guru | | 120 Guru | 434 | 120 Guru | 498 | | 120 Guru | 500 | 120 Guru | 500 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Penunjang Admnistrasi Sertifikasi Guru SD, SMP dan Pengawas | Jumlah Kegiatan | | 1 Kegiatan | 96 | 1 Kegiatan | 40 | 1 Kegiatan | 29 | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Pelatihan Dapodik Jenjang SD dan SMP | Jumlah Operator Dapodik | | | 140 Operator | 248 | 140 Operator | 125 | 145 Operator | 300 | 145 Operator | 300 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Penguatan Kurikulum 13 Jenjang SD dan SMP | Jumlah Guru | | | | 60 Guru | 178 | | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Rekrutmen Kepala Sekolah SD dan SMP | Jumlah Kepsek | | | | | 15 Kepsek | 300 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) | Jumlah Komunitas | | | | | 20 Komunitas SMP dan SD | 200 | 30 Komunitas SMP dan SD | 300 | 30 Komunitas SMP dan SD | 300 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Olimpiade Sains Guru | Jumlah Kegiatan | | | | | 1 Kegiatan | 50 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah | Jumlah Kegiatan | | | | | 1 Kegiatan | 100 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik (SD) Ke S1 | Jumlah PTK | | | | | 50 PTK | 700 | 90 PTK | 1284 | 90 PTK | 1284 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi | Jumlah Kegiatan | | | | | 1 Kegiatan | 184 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Pengembangan sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | Jumlah sekolah | | | | | 142 SD dan SMP | 290 | 142 SD dan SMP | 500 | 142 SD dan SMP | 500 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Penyusunan Pedoman , Profil Dinas Pendidikan dan Petunjuk Teknis Wajar 16 Tahun | Jumlah Buku | | | | | 300 Buku | 57 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dak Non Fisik) | Jumlah Kegiatan | | | | | 1 Kegiatan | 561 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Pendidikan Profesi Guru (PPG) | Jumlah Guru | | | | | | | 30 Guru | 650 | 30 Guru | 650 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-----|-------------------------------------|------|--------------------|-------|------------------------------|------|------------------------------|------|---------------------|
| | | | Penunjang Admministrasi Tunjangan Profesi guru SD, SMP dan pengawas | Jumlah Kegiatan | | | | | | 1 Kegiatan | 100 | 1 Kegiatan | 100 | | | |
| | | | Pemilihan Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi SD dan SMP | Jumlah Kepsek dan Pengawas | | | | | | 50 Orang | 300 | 50 Orang | 300 | | | |
| | | | Pelatihan Calon Kepala Sekolah SD dan SMP | Jumlah Calon Kepsek | | | | | | 23 Orang | 500 | 23 Orang | 500 | | | |
| | | | Penguatan kepala sekolah SD dan SMP | Jumlah Kepsek | | | | | | 40 Kasek | 400 | 40 Kasek | 400 | | | |
| | | | Olimpiade Guru Nasional SD dan SMP | Jumlah Guru | | | | | | 30 Orang | 250 | 30 Orang | 250 | | | |
| | | | Peningkatan dan pelatihan kompetensi tenaga pendidik | Jumlah Guru | | | | 50 Guru | 175 | 50 Guru | 400 | 50 Guru | 400 | | | |
| | | | Pelatihan Kurikulum 2013 Jenjang SD dan SMP | Jumlah Guru | | | | | | 120 Guru | 500 | 120 Guru | 500 | | | |
| | | | Insentif PTK PAUD, SD dan SMP | Jumlah Kegiatan | | | | | | 1 Kegiatan | 3640 | 1 Kegiatan | 3640 | | | |
| | | | Kursus Dasar Pembina Pramuka | Jumlah Pembina Pramuka | | | | | | 40 org | 300 | 40 org | 300 | | | |
| | | | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1 Tahun | 33,01 | 446.221.350,00 | | | | | | | | | | |
| | | | Operasional Pengawas Sekolah | Jumlah Kegiatan | | 1 Keg | 298 | 1 keg | 750 | 1 Kegiatan | 750 | 1 Kegiatan | 750 | 1 Kegiatan | 750 | Dinas Pendidikan |
| | | | Operasional UPTD Malinau Kota | Jumlah Kecamatan | | 3 kec | 44 | 3 Kecam atan | 60 | 3 Kecam atan | 60 | 3 Kecamatan | 60 | 3 Kecamatan | 60 | Dinas Pendidikan |
| | | | Operasional UPTD Mentarang | Jumlah Kecamatan | | 3 kec | 72 | 3 Kecam atan | 100 | 3 Kecam atan | 100 | 3 Kecamatan | 110 | 3 Kecamatan | 110 | Dinas Pendidikan |
| | | | Operasional UPTD Malinau Selatan | Jumlah Kecamatan | | 3 kec | 59 | 3 Kecam atan | 75 | 3 Kecam atan | 75 | 3 Kecamatan | 75 | 3 Kecamatan | 75 | Dinas Pendidikan |
| | | | Operasional UPTD Sungai Boh | Jumlah Kecamatan | | 1 kec | 49 | 1 Kecam atan | 75 | 1 Kecam atan | 75 | 1 Kecamatan | 75 | 1 Kecamatan | 75 | Dinas Pendidikan |
| | | | Operasional UPTD Kayan Hulu | Jumlah Kecamatan | | 3 kec | 74 | 3 Kecam atan | 100 | 3 Kecam atan | 100 | 3 Kecamatan | 110 | 3 Kecamatan | 110 | Dinas Pendidikan |
| | | | Operasional UPTD Pujungan | Jumlah Kecamatan | | 2 kec | 98 | 2 Kecam atan | 100 | 2 Kecam atan | 100 | 2 Kecamatan | 110 | 2 Kecamatan | 110 | Dinas Pendidikan |
| | | | Pengadaan Komputer dan Server Ujian Nasional berbasis komputer | Jumlah server dan Komputer | | 5 Server 40 Kompute r | 413 | 10 Serve r 50 kompu ter | 650 | | | 15 Server 100 Komputer | 1461 | 17 Server 100 Komputer | 1581 | Dinas Pendidikan |
| | | | Peningkatan Mutu data dan Pelaporan | Jumlah Kegiatan | | 1 kegiatan | 190 | | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | Honor Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak | Jumlah Guru | | | | 317 Orang | #### | 317 Orang | 15453 | | | | | Dinas Pendidikan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|--|--|----------------|-----|--------------------|------|----------------|-----|----------------|-----|------------------|------------------|--------------|
| | | | Penunjang Administrasi Incentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS pada Sekolah Swasta dan Negeri | Jumlah Kegiatan | | | 1 kegiatan | 7 | 1 kegiatan | 36 | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau | |
| | | | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI dan SMP/MTs | Jumlah Kegiatan | | | 2 Kegiatan | 300 | 2 Kegiatan | 268 | 2 Kegiatan | 260 | 2 Kegiatan | 260 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD/MI dan SMP/MTs | Jumlah Siswa | | | 15 siswa/siswi | 300 | 15 siswa/siswi | 268 | 15 siswa/siswi | 260 | 15 siswa/siswi | 260 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI dan SMP/MTs | Jumlah Kegiatan | | | 1 keg | 150 | 1 keg | 250 | 1 keg | 260 | 1 keg | 260 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Dana Pendamping Kegiatan Inovasi | Jumlah Kegiatan | | | 1 keg | 100 | 1 keg | 150 | 1 keg | 175 | 1 keg | 175 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Penerimaan Peserta Didik Baru | Jumlah Kegiatan | | | | | 1 keg | 24 | 1 keg | 70 | 1 keg | 70 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Monitoring Implementasi Kurikulum 2013 | Jumlah Kegiatan | | | | | 1 keg | 93 | 1 keg | 130 | 1 keg | 130 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Liga Sepak Bola Indonesia SMP | Jumlah Kegiatan | | | | | 1 Kegiatan | 248 | 1 Kegiatan | 275 | 1 Kegiatan | 275 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP | Jumlah Kegiatan | | | | | 1 Kegiatan | 48 | 1 Kegiatan | 100 | 1 Kegiatan | 100 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perkembahan Pelajar | Jumlah Kegiatan | | | | | 1 Kegiatan | 100 | 1 Kegiatan | 79 | 1 Kegiatan | 79 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Evaluasi Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Sekolah | Jumlah Sekolah | | | | | 45 Sekolah | 122 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Penunjang Administrasi dan Operasional Pendidikan Non Formal | Jumlah Kegiatan | | | | | 1 Kegiatan | 50 | 1 Kegiatan | 50 | 1 Kegiatan | 70 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Bantuan Penguatan Kelembagaan PKBM | Jumlah Kegiatan | | | | | 1 Kegiatan | 100 | 1 Kegiatan | 99 | 1 Kegiatan | 99 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Pendidikan Profesi Guru (PPG) | Jumlah Guru | | | | | 25 Tenaga Pendidik | 470 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Aktivasi Kelembagaan PKBM | Jumlah Kegiatan | | | | | | | 1 Kegiatan | 100 | 1 Kegiatan | 100 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Pelaksanaan US dan UN SD/MI dan SMP/MTs dan Paket A, B,C | Jumlah Kegiatan | | | | | | | 1 Kegiatan | 950 | 1 Kegiatan | 950 | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Incentif Pendidikan Dan Tenaga Pendidik PAUD, SD dan SLTP Kab. Malinau | Jumlah PTK | | | | | 380 Org | 2412 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Penambahan RKB SMP 3 Mentarang | Jumlah Dokumen | | | | | 1 Dokumen | 50 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Penambahan RKB TK Pratama | Jumlah Dokumen | | | | | 1 Dokumen | 50 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Perencanaan Rumah Dinas Guru SDN 006 Bahau Hulu | Jumlah Dokumen | | | | | 1 Dokumen | 30 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----------|------------|-----|------------|-----|--------|--|------------------|--------------|
| | | | Muebelair dan Pemasangan Keramik Ruang Kelas SD 006 Bahau Hulu | Jumlah Sekolah | | | | | 1 Sekolah | 100 | | | | | | Dinas Pendidikan | Kab. Malinau |
| | | | Bantuan Sarana ICT dan Bahan Bacaan Masyarakat | Jumlah TBM | | | | | | 6 TBM | 146 | 6 TBM | 146 | | | | |
| | | | Pelatihan dan Sosialisasi Operator DAPODIK PAUD dikmas | Jumlah Operator | | | | | | 120 Org | 120 | 120 Org | 120 | | | | |
| | | | Akreditasi SD dan SMP | Jumlah Sekolah | | | | | | 80 Sekolah | 200 | 64 Sekolah | 200 | | | | |
| | | | Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS | Jumlah Kegiatan | | | | | | 1 Kegiatan | 158 | 1 Kegiatan | 158 | | | | |
| | | | | | | | | | ## | #### | | 63,640 | | 89,323 | | 96,453 | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan memperhatikan uraian mengenai tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan serta komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD, maka indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau ditampilkan dalam berikut ini :

Tabel 7.1
Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2016-2021

| No. | INDIKATOR | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|-----|-------------------------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | TAHUN 0 | TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN 3 | TAHUN 4 | TAHUN 5 | |
| 1 | APS SD/MI | 99,31 | 99,33 | 99,34 | 99,36 | 99,37 | 99,38 | 99,38 |
| 2 | APS SMP/MTs | 90,67 | 90,69 | 90,70 | 90,71 | 90,72 | 90,76 | 90,76 |
| 3 | APM SD/MI | 96,26 | 96,28 | 96,29 | 96,30 | 96,32 | 96,33 | 96,33 |
| 4 | APM SMP/MTs | 80,43 | 80,80 | 81,72 | 83,13 | 85,01 | 85,45 | 85,45 |
| 5 | Rata-rata Lama Sekolah | 8,30 | 8,48 | 8,97 | 9,56 | 9,87 | 10,20 | 10,20 |
| 6 | Angka melek huruf | 83,03 | 83,14 | 83,25 | 83,36 | 83,57 | 83,88 | 84,08 |
| 7 | Angka kelulusan SD/MI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Angka kelulusan SMP/MTs | 98,97 | 98,98 | 99,00 | 99,01 | 99,03 | 99,04 | 99,04 |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi program Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk 5 (lima) tahun mendatang dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Malinau dan setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang pendidikan, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renstra Tahun 2016 – 2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan pelaksana harian Bagian Perencanaan.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris beserta bidang-bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.
3. Seluruh Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau agar melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2016 – 2021 dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas dan fungsi bidang masing-masing berkewajiban untuk menyusun program kegiatan yang mengandung tujuan dan strategi yang ada dalam Renstra Tahun 2016 – 2021.
5. Agar Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap bidang teknis/fungsional, sekretariat dan UPTD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Renstra Tahun 2016 – 2021 ini, di samping itu ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, instansi terkait maupun masyarakat luas.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2016 – 2021, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pendidikan, dilakukan oleh masing-masing kepala bidang teknis dan UPTD.

- b. Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- c. Bagian Perencanaan menyusun evaluasi rencana kerja berdasar hasil evaluasi Kepala OPD.
- d. Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2016–2021 dihadapkan pada hal-hal diluar kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat ditinjau melalui konsultasi dengan Bappeda untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Malinau, 25 September 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau.

FX. Brata Puji Susila, S.Pd, M.Pd.
NIP 19620722 198403 1 010